KEBIJAKAN FISKAL DAN EFISIENSI SEKTOR PUBLIK

Sri Yulianti Mozin¹
yulmozin@ung.ac.id

¹Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRACT

Fiscal policy is an important instrument in managing a country's economy, involving the use of government spending and taxation policies to influence economic conditions. The main objectives of fiscal policy are to stabilize the economy, promote economic growth, create jobs, and control inflation. In a recession, the government can implement an expansionary fiscal policy by increasing public spending or reducing taxes to stimulate aggregate demand. Conversely, in conditions of high inflation, a contractionary fiscal policy can be implemented by reducing spending or increasing taxes to cool the economy. However, the effectiveness of fiscal policy is often influenced by factors such as the level of government debt, public response, and coordination with monetary policy. The main challenge in implementing fiscal policy is maintaining a balance between economic stimulation and fiscal poverty in the long run. With careful planning, fiscal policy can be an effective tool for achieving economic stability and prosperity.

Keywords: Tax Collection, Bonds, Domestic/Foreign Debt, Privatization.

ABSTRAK

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara, yang melibatkan penggunaan pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan untuk memengaruhi kondisi ekonomi. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah menstabilkan perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengendalikan inflasi. Dalam situasi resesi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak untuk merangsang permintaan agregat. Sebaliknya, dalam kondisi inflasi yang tinggi, kebijakan fiskal kontraktif dapat diterapkan dengan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mendinginkan perekonomian. Namun, efektivitas kebijakan fiskal sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat utang pemerintah, respons masyarakat, dan koordinasi dengan kebijakan moneter. Tantangan utama dalam implementasi kebijakan fiskal adalah menjaga keseimbangan antara stimulasi ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, kebijakan fiskal dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan ekonomi.

Kata Kunci: Pungutan Pajak, Obligasi, Hutang Dalam Negeri/Luar Negeri, Privatisasi.

PENDAHULUAN

Secara konvensional kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai alat rekayasa

pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya

aktivitas perekonomian suatu negara. Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. (Huda et al., 2024) Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN. Ketika APBN digunakan sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat maka inflasi akan terkendali dengan baik sehingga berdampak pada pertumbuhan yang signifikan dan merata dalam ruang lingkup makro yaitu negara. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual.(Huda et al., 2024)

Kebijakan fiskal berperan penting dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui mekanisme pengeluaran publik yang terarah seperti subsidi dan program bantuan sosial yang mana menurut studi terbaru belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia yang merupakan indikator utama Kesejahteraan Sosial.(Huda et al., 2024)

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam hal pemungutan pajak dan membelanjakannya untuk memfasilitasi berbagai macam program perekonomian (Hamja 2018). Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pemasukkan dan pengeluaran negara yang.(Zakiyatul Miskiyah et al., 2022)

Kebijakan fiskal atau dari sisi lain bisa juga dikatakan dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal dengan dicontohkan dalam pengelolaan pengeluaran negara maupun pemasukan negara yang bermaksud untuk mempengaruhi jumlah permintaan agregat dalam ranah perekonomian.(Zakiyatul Miskiyah et al., 2022). Kebijakan fiskal ialah suatu kebijakan pemerintahan yang di dalamnya memiliki keterkaitan dengan pengaturan kinerja perekonomian menggunakan mekanisme pemasukan dan pengeluaran pemerintah. kebijakan fiskal yang efektif dapat meningkatkan efisiensi sektor publik dengan memastikan sumber daya digunakan secara optimal dan layanan publik dikelola dengan baik.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama dalam repertoar kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara, serta pengelolaan utang dan pinjaman. Secara spesifik, kebijakan fiskal dapat berupa langkah-langkah untuk mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, atau mengelola utang dan pinjaman negara. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro, seperti menjaga stabilitas perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan mengurangi tingkat pengangguran.(Rusiadi. E & Sari, 2020).

LITERATURE REVIEW

Menurut Adiyanta, F. S. dalam (Edi Irawan, 2023) yaitu kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif dirancang untuk mengekang inflasi yang cepat, sedangkan

kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk mendorong ekonomi dan menghindari resesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, artikel, dan dokumen resmi terkait kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi. Artikel ilmiah yang telah terverifikasi untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Kredibilitas sumber menjadi prioritas utama agar hasil kajian tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan Pungutan Pajak

Penerimaan pajak memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pembiayaan negara. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan sumber utama berbagai program dan layanan publik. Dengan penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan lebih mudah menjalankan fungsi utamanya, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan keamanan hingga pembangunan infrastruktur. Bayangkan sebuah negara dengan sistem penerimaan pajak yang optimal. Dengan penerimaan pajak yang stabil dan memadai, pemerintah dapat mengalokasikan dana secara efisien ke berbagai sektor vital. (Noch et al., 2024)

Rasio pajak Indonesia yang rendah tidak terlepas dari tinggi dan masifnya agresivitas pajak yang dilakukan Wajib pajak. Di masyarakat umum, banyak sekali padanan kata dari agresivitas di bidang perpajakan, ada yang menyebut dengan penghindaran pajak,

ada juga yang menyebutnya dengan istilah manajemen pajak. Manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan secara totalitas baik di perusahaan maupun organisasi agar pajak yang seharusnya dibayarkan dapat dikelola secara efisien dan ekonomis oleh perusahaan tersebut. (Wijaya & Ahmar, 2022)

Meskipun berbagai penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara kepatuhan pajak dan penerimaan pajak serta peran pemeriksaan pajak, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang perlu diidentifikasi. Kesenjangan ini terutama terkait dengan perlunya lebih banyak hasil penelitian mengenai efektivitas pemeriksaan pajak dalam memoderasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Namun, hasil ini terkadang hanya konsisten di berbagai konteks dan wilayah. Selain itu, penelitian seperti yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa kepatuhan dan penagihan pajak berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, terkadang pemeriksaan pajak memiliki efek yang berbeda. Keterbatasan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan konteks negara dan sistem perpajakan. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di negara maju dengan sistem pajak yang lebih terstruktur, sehingga hasilnya mungkin hanya berlaku sebagian di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, faktor-faktor seperti kompleksitas peraturan perpajakan, beban administratif, dan sikap wajib pajak terhadap otoritas pajak belum sepenuhnya dieksplorasi dalam konteks ini. (Noch et al., 2024)

Dampak pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi subjek

banyak penelitian. Pajak penghasilan dapat memengaruhi keputusan investasi, konsumsi, dan tabungan individu dan bisnis. Studi empiris menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja dan berinvestasi. Pajak yang rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli dan investasi. Di Indonesia, pajak penghasilan juga berdampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk industri dan jasa. Penelitian menemukan bahwa pajak penghasilan berkorelasi positif dengan pertumbuhan sektor manufaktur, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Penerapan pajak penghasilan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penghindaran dan pengelakan pajak Ketidakpastian hukum dan administratif dalam sistem pajak penghasilan juga signifikan. Gesekan informasi antara perusahaan dan regulator, yang mengarah pada ketidakpastian tentang standar regulasi, dapat mengurangi efisiensi upaya kepatuhan perusahaan. Solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini meliputi penyederhanaan peraturan pajak, peningkatan transparansi, dan peningkatan kapasitas administrasi pajak. (Noch et al., 2024)

Kepatuhan wajib pajak merupakan konsep penting dalam sistem perpajakan yang mencerminkan bagaimana orang pribadi atau badan usaha memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi kepatuhan wajib pajak bervariasi menurut berbagai literatur dan perspektif. Misalnya, menurut Pengambilan keputusan Wajib Pajak bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, kualitas layanan, dan kesadaran terhadap peraturan perpajakan.

Perbedaan antara kepatuhan formal dan substantif juga penting untuk dipahami. Kepatuhan formal atau administratif mencakup pemenuhan prosedural, seperti penyampaian laporan pajak tepat waktu. (Noch et al., 2024)

Regulasi dan kebijakan yang mendukung kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif. Kebijakan perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan meliputi penyederhanaan prosedur perpajakan, pengurangan beban administrasi, dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh. menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan pajak yang transparan dan adil cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Peran teknologi dalam mendukung kepatuhan pajak juga semakin penting, seperti penggunaan e-filing dan digitalisasi administrasi perpajakan, yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan meningkatkan akurasi pelaporan. Metode pengukuran kepatuhan wajib pajak melibatkan berbagai pendekatan, termasuk survei dan wawancara untuk memahami sikap dan perilaku wajib pajak, serta penggunaan data sekunder dari laporan administrasi perpajakan. Analisis menunjukkan bahwa kombinasi metode pengukuran memberikan gambaran kepatuhan wajib pajak yang lebih akurat. Dampak kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak cukup signifikan. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung stabilitas fiskal. Sebuah studi empiris oleh menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Kasus-kasus di negara-negara Skandinavia menunjukkan bahwa

sistem pajak yang transparan dan adil berhasil meningkatkan pendapatan negara.(Noch et al., 2024)

Selain perbaikan regulasi dan administrasi, mendidik wajib pajak sangat penting untuk pendekatan komprehensif ini. Program pendidikan pajak yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak, memperjelas manfaat kepatuhan, dan menghilangkan kesalahpahaman umum tentang sistem pajak. Program-program ini harus menargetkan berbagai segmen populasi, termasuk pemilik usaha kecil, wajib pajak perorangan, dan perusahaan besar, memastikan setiap orang dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk mematuhi undang-undang pajak. Misalnya, menerapkan sistem e-filing dan e-payment dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka. Sistem e-filing memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan laporan pajak secara online, mengurangi kebutuhan akan dokumentasi fisik dan kunjungan ke kantor pajak. Sementara itu, pembayaran elektronik memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam proses pembayaran. Digitalisasi administrasi perpajakan juga meningkatkan akurasi dan efisiensi proses perpajakan dengan memungkinkan otoritas pajak mengelola dan memantau data pajak secara lebih efektif. Dengan teknologi ini, kesalahan dalam pelaporan pajak dapat dikurangi, dan otoritas pajak dapat lebih cepat mendeteksi dan mengatasi ketidakpatuhan. Oleh karena itu, upaya ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(Noch et al., 2024)

Pengetahuan perpajakan mencakup penguasaan terhadap peraturan, prosedur, dan sanksi perpajakan, yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih lengkap dan benar dalam hal pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan. Lebih jauh lagi, pengetahuan memungkinkan wajib pajak untuk mengelola strategi perpajakan berdasarkan ketentuan atau insentif pajak yang berlaku. Untuk memperhitungkan transaksi-transaksi ini dalam pengembalian pajak mereka, wajib pajak harus memiliki pemahaman pajak yang baik.(Titailla & Fidiana, 2022)

Sering kali dikatakan bahwa kesenjangan pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak. Meskipun membiayai iklan untuk meningkatkan kesadaran pajak tentu lebih murah daripada memerangi penggelapan pajak. Otoritas pajak telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain menerbitkan pamflet, strategi yang dilakukan termasuk menyediakan buklet terkait pajak penghasilan dan memperbarui petunjuk pajak di media sosial. Membuat iklan media sosial yang lucu yang mencirikan kewajiban pajak juga merupakan pilihan. Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya kesadaran dalam meningkatkan perilaku patuh. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.(Titailla & Fidiana, 2022)

Terkait dengan itu, kurangnya strategi reformasi yang luas menyiratkan bahwa administrasi pajak, yang secara historis lebih berkembang dalam TI, sering kali berkoordinasi dengan lembaga publik eksternal yang berada pada tahap pengembangan TI yang lebih rendah. Hal ini menimbulkan hambatan dan penundaan

dalam fungsi-fungsi utama. Contohnya adalah Sierra Leone, di mana integrasi yang lancar, pembagian data atau komunikasi antara NRA dan biro yang bertanggung jawab atas pendaftaran pedagang (OARG) terhambat oleh kurangnya kapasitas teknis yang terakhir (akibat kendala keuangan dan SDM).(Okunogbea et al., 2023)

Menerbitkan obligasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah mendefinisikan obligasi daerah sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi daerah merupakan salah satu jenis dari pinjaman daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di daerah tersebut.(Khurria, 2023)

Dalam panduan penerbitan obligasi daerah yang dipublikasikan di website DJPK Kementerian keuangan, disebutkan beberapa prinsip umum obligasi daerah, yaitu: (a) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah. (b) Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah. (c) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. (d) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.(Khurria, 2023)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang menentukan terlaksananya penerbitan obligasi daerah.

Proses penerbitan obligasi daerah memerlukan kualifikasi SDM yang memiliki kompetensi dan memiliki pengalaman di bidang investasi dan pasar modal. Walaupun nantinya penerbitan obligasi daerah akan didampingi oleh pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pasar Modal, tentunya Pemerintah Daerah tetap harus mempersiapkan sumber daya yang kompeten yang mampu bekerja dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait tersebut. Obligasi daerah di Indonesia belum ada yang diterbitkan karena kurangnya kapasitas pegawai Pemda. Hambatan terkait sumber daya manusia ini adalah hambatan terbesar yang dialami oleh Pemda.(Khurria, 2023)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara dan Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, pengelolaan obligasi daerah dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Unit tersebut bertugas mengelola obligasi daerah yang meliputi persiapan, perencanaan, penerbitan, penjualan, pembelian kembali, pelunasan, hingga pertanggungjawaban obligasi daerah. Unit tersebut juga harus memiliki struktur organisasi, perangkat kerja, dan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi pengelolaan obligasi daerah. Unit ini diharapkan akan fokus pada pengelolaan obligasi daerah saja sehingga tidak mengganggu pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan unit kerja pengelolaan obligasi daerah ini dapat dikatakan sebagai langkah awal dalam tahap persiapan penerbitan obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah tentunya harus dilengkapi dengan payung hukum yang menaungi pelaksanaan penerbitan obligasi daerah. Walaupun telah

ada payung hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dll, pemerintah daerah tetap harus mempersiapkan regulasi daerah yang menjadi dasar penerbitan obligasi daerah. (Khurria, 2023)

Penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan oleh daerah yang telah memiliki kesiapan yang tinggi dan tingkat transparansi yang baik. Dengan menerbitkan obligasi daerah, berarti daerah membuka dirinya dan harus siap membuka keadaan perekonomian dan keuangan daerah. Hal ini perlu dilakukan agar daerah dapat dipercaya oleh para investor dan obligasi daerah dapat menarik minat investor. Lebih lanjut, daerah yang akan menerbitkan obligasi harus mampu membuka akses publik terhadap laporan keuangan daerah, karena keterbukaan keuangan serta informasi menjadi hal yang sangat diperlukan untuk pemberian rating obligasi dari lembaga pemeringkat nantinya. (Khurria, 2023)

Apabila terdapat pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi daerah, maka pemerintah pusat harus memberikan dukungan teknis dan layanan konsultasi dalam proses penerbitan obligasi, yang dimulai dari proses penyiapan penerbitan obligasi. Bentuk dukungan teknis yang diberikan dapat berupa asistensi, atau bahkan menyediakan tenaga ahli untuk Pemda. (Khurria, 2023)

Obligasi adalah jenis surat utang yang dapat digunakan oleh berbagai pelaku pasar (negara, perusahaan, bank) untuk mengumpulkan dana guna tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan perjanjian obligasi, pemegang yang membeli surat utang berhak atas modal yang dipinjamkan, pembayaran bunga nominal terkait (kupon), dan jika obligasi dapat dipindahtanggankan, mereka

juga berhak untuk menjualnya. Jangka waktu jatuh tempo obligasi disebut periode jatuh tempo, dan biasanya lebih lama daripada pinjaman bank. (Bécsi et al., 2021)

Dalam kasus obligasi, pendapatan bunga dan pembayaran modal investor dapat dihitung lebih akurat, yang menguntungkan dari perspektif pertimbangan stabilitas keuangan. Risiko investor terutama terdiri dari pergerakan harga obligasi yang diakibatkan oleh perubahan imbal hasil pasar, karena investor akan mengalami kerugian pada obligasi jika imbal hasil yang diharapkan di pasar keuangan meningkat. Faktor risiko lain yang mungkin terjadi adalah ketika obligasi tidak dijamin: secara hukum, pemegang obligasi tersebut diklasifikasikan dalam peringkat senioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan pemegang sekuritas yang dijamin dengan agunan. (Bécsi et al., 2021)

Peningkatan yield obligasi pemerintah berdampak signifikan terhadap beban anggaran pemerintah, terutama pada pembayaran bunga yang harus dibayarkan setiap tahun. Yield obligasi pemerintah lebih ditentukan oleh variable makroekonomi, termasuk suku bunga, defisit anggaran, pasar saham, cadangan devisa, dan harga minyak dunia

membuktikan bahwa cadangan devisa, harga minyak dunia, inflasi, nilai tukar, dan jumlah uang beredar memengaruhi yield obligasi pemerintah. (Fatmawatie et al., 2024)

membuktikan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap yield obligasi pemerintah. mengungkapkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap return obligasi dalam jangka panjang. Sebaliknya, menemukan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap return dalam jangka panjang. (Fatmawatie et al., 2024)

Pinjaman utang dalam negeri dan luar negeri

Salah satu cara yang efisien untuk memobilisasi dana guna mendukung perluasan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang, adalah dengan pinjaman pemerintah—Sebagian besar pemerintah di negara-negara berkembang menggunakan pinjaman untuk menutupi defisit fiskal. Pinjaman pemerintah dapat diterima karena pajak saja tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai anggaran nasional. Penting untuk diingat bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan ketidakstabilan anggaran dan moneter, yang sebagian dapat ditutupi dengan pinjaman dari pemerintah. Utang domestik pemerintah digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk membiayai defisit anggaran ketika pemerintah tidak dapat memenuhi komitmennya untuk membayar pengeluaran melalui pengumpulan pendapatan domestik, hibah eksternal, dan pinjaman; membantu pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan pasar terbuka; dan mendorong pertumbuhan pasar keuangan melalui pinjaman. Selain itu, pinjaman dilakukan untuk memengaruhi permintaan agregat agar ekonomi tetap stabil. Memaparkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan yang ditulis dengan sistematis, kemudian dilakukan analisis secara kritis, dan disajikan secara informatif. (F. Sabado et al., 2024)

Mayoritas utang yang timbul dari sumber domestik dan eksternal, negara dan swasta, namun, secara umum belum digunakan secara bijaksana untuk mendorong pembangunan infrastruktur fundamental yang menarik investasi dan mendorong pertumbuhan, terutama dengan keahlian selama bertahun-tahun di negara-negara

berkembang. Pengembangan sektor keuangan akan mengubah cara aset dan instrumen sistem keuangan disusun. Lebih jauh, pergerakan modal global mempercepat aktivitas pasar keuangan melalui persaingan internasional, strategi bisnis yang kreatif, dan inovasi teknologi. Hasilnya, sektor keuangan membaik, mempercepat pertumbuhan ekonomi. (F. Sabado et al., 2024)

utang luar negeri dan pertumbuhan. Ketika dana dari sumber luar negeri digunakan untuk layanan sosial seperti kesehatan, kesejahteraan, kompensasi pengangguran, atau pendidikan, ini disebut sebagai hubungan langsung. Hubungan yang tidak langsung menyiratkan investasi yang mengarah pada ekspansi ekonomi di mana pinjaman luar negeri digunakan untuk menutupi ketidakseimbangan sumber daya domestik. Beberapa jenis hubungan yang berbeda antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi dapat disorot melalui penilaian cepat literatur yang menganalisis dampak tersebut. Akibatnya, ditentukan bahwa mungkin ada efek menguntungkan, merugikan, netral, atau nonlinier dari utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri dapat terjadi ketika permintaan investasi suatu negara melebihi tabungan domestiknya. Pemerintah perlu meminjam untuk memenuhi kebutuhan anggarannya jika terjadi defisit untuk menutup kesenjangan sumber daya antara tabungan dan investasi. Negara-negara yang mengalami kesenjangan ini sering beralih ke pinjaman luar negeri, tetapi mereka juga berpendapat bahwa utang adalah salah satu cara utama untuk membiayai pembentukan modal dalam ekonomi apa pun. (F. Sabado et al., 2024)

sebagian besar negara memandang investasi asing dan pinjaman dari luar negeri

sebagai penyebab utama pertumbuhan ekonomi, khususnya negara berkembang dan negara berkembang yang kesulitan menabung. Fokus pada utang luar negeri dikaitkan dengan kerentanannya, yang dapat menyebabkan krisis utang, mengingat pembiayaan inisiatif pembangunan merupakan hal yang khas bagi negara industri dan negara berkembang. Utang luar negeri memiliki konsekuensi negatif terhadap spekulasi utang yang menggantung. dampak pada investasi Negara-negara berutang hanya dapat memperoleh keuntungan sebagian dari perluasan produksi. Motifnya adalah bahwa sebagian dari manufaktur akan membayar utang kepada negara kreditor, yang merupakan pertimbangan dalam pemilihan investasi dan manufaktur. Pertumbuhan ekonomi adalah proporsi luas suatu negara dan nilai pembangunan ekonomi yang ditentukan oleh produk domestik bruto. Ketika PDB berkembang, itu menunjukkan bahwa suatu negara sedang berkembang. Lebih banyak energi dibutuhkan untuk mempertahankan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti yang dikatakan bahwa membayar sejumlah besar utang luar negeri dapat menguras mata uang asing yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan sosial. Depresiasi mata uang lokal akan memperkuat layanan utang luar negeri, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro. Lebih jauh lagi, menanggung utang dengan tingkat yang bervariasi membuat negara tersebut rentan terhadap perubahan tingkat bunga di pasar dunia, yang dapat mengakibatkan biaya pembayaran utang yang lebih tinggi. Ukuran utama kemakmuran adalah skala dan kecepatan pertumbuhan, meskipun terkadang dapat sesuai dengan tingkat kualitas hidup populasi yang akurat. Kemudian,

pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamika proses keuangan negara, meskipun ada keterbatasannya. Kemajuan dalam situasi ekonomi suatu negara berdasarkan berbagai indikator yang terkait dengan masalah ekonomi individu dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. (F. Sabado et al., 2024)

Sebagian besar negara berkembang menyarankan opsi utang atau pinjaman sebagai opsi pembiayaan defisit yang lebih baik karena tidak menyebabkan efek inflasi dalam perekonomian dibandingkan dengan mencetak uang atau mengenakan pajak tinggi kepada public. Mencetak uang menyebabkan inflasi dengan meningkatkan jumlah uang beredar dan dapat menimbulkan efek negatif bagi perekonomian dalam jangka panjang. Selain itu, meningkatkan pungutan ke tingkat yang tidak dapat ditanggung atau mengurangi pengeluaran pokok untuk mengurangi defisit anggaran merupakan ancaman besar bagi pertumbuhan dan pembangunan alami negara. (Sathanantham, 2022)

Utang publik domestik merupakan salah satu sumber penting untuk menyediakan pembiayaan defisit anggaran. Ketika pinjaman pemerintah dari sumber perbankan domestik meningkat, permintaan dana pinjaman meningkat dan dapat memengaruhi kenaikan suku bunga. Pada suku bunga yang lebih tinggi, biaya yang dapat digunakan oleh sektor swasta meningkat, sehingga semakin sulit bagi sektor swasta untuk mengakses dana pinjaman. (Sathanantham, 2022)

Privatisasi

BUMN yang berorientasi publik membantu dalam mengkoordinasikan penyebaran pengetahuan dalam sistem inovasi nasional ketika pekerjaan tambahan diperlukan untuk menggunakan pengetahuan

yang ada untuk menciptakan pengetahuan baru (Nelson, 1993). Untuk organisasi besar yang biasanya bekerja di industri hulu, BUMN memprioritaskan penelitian dasar dan proyek jangka panjang dalam strategi penelitian mereka untuk organisasi besar yang biasanya bekerja di industri hulu. Karena karakteristik ini, BUMN sering dilihat sebagai tokoh kunci dalam mekanisme tata kelola pengetahuan. Meskipun kelebihan dan kekurangannya terdokumentasi dengan baik, satu aliran pemikiran berpendapat bahwa BUMN pada dasarnya tidak buruk atau baik. Struktur organisasi perusahaan tempat mereka bekerja memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitasnya.(Masalah et al., 2024)

Orang mungkin bertanya-tanya apakah dukungan terhadap privatisasi memungkinkan sektor swasta untuk memasuki pasar, mengingat kegagalan perusahaan publik yang nyata. Dengan kata lain, privatisasi menarik uang tunai yang seharusnya disimpan di luar negeri atau digunakan untuk transaksi bisnis yang meragukan. Meskipun sektor swasta lebih kecil kemungkinannya daripada sektor publik untuk berinvestasi dalam modal produktif, masih mungkin untuk menyatakan bahwa privatisasi menguntungkan. Privatisasi memiliki efek crowding-in pada investasi karena pertama-tama meningkatkan kepercayaan pada komitmen rezim terhadap kebijakan ekonomi pro-pemilik properti dan kemudian mengalihkan dana investasi dari kegiatan mencari keuntungan langsung yang tidak produktif (Cheteni & Khamfula, 2018). Tentu saja, pengalihan ini mungkin tidak selalu menguntungkan bagi semua orang dalam rezim yang miring. Dapat dikatakan bahwa tujuan non-ekonomi perusahaan publik lebih peduli dengan memajukan

kepentingan kelompok yang kuat daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.(Masalah et al., 2024)

Apa yang disebut sebagai tata kelola perusahaan BUMN dipengaruhi oleh peran kepemilikan negara, peran pengawasan pemerintah, peran pengawasan dewan direksi, dan implikasi keagenan dari kontrak antara pemerintah dan agen-agennya. Integrasi komponen-komponen struktural ini diinformasikan oleh konteks reformasi regulasi yang lebih luas, kepentingan nasional, legitimasi publik, budaya organisasi, dan dampak sosial. Kurangnya insentif agen untuk meningkatkan laba perusahaan mereka karena subsidi negara yang besar dan kendala anggaran yang longgar berkontribusi pada peran negara sebagai prinsipal, yang menyebabkan pemantauan yang buruk di negara-negara berkembang, fokus pada BUMN dan menegakkan kontrak agensi. Politisi sering mengabaikan dewan direksi saat membuat keputusan operasional dan jangka panjang di BUMN.(Masalah et al., 2024)

Memahami batasan-batasan privatisasi sangatlah penting. Tujuan dari inisiatif privatisasi bukanlah untuk mengalihkan semua tanggung jawab sosial dan ekonomi pemerintah kepada sektor swasta. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui pengawasan manajerial dan struktur insentif yang lebih baik dengan memprivatisasi perusahaan publik dan membangun lingkungan kebijakan yang tepat. Peran negara dalam kebijakan sosial tidak diragukan lagi hadir bahkan ketika perusahaan publik diprivatisasi. Sebelum privatisasi, badan usaha milik negara perlu dipisahkan dari badan pengaturnya. Peraturan harus diberlakukan di pasar yang tidak kompetitif untuk melindungi konsumen dari

perilaku anti-kompetitif. Negara memiliki kewajiban untuk membela kepentingan publik melalui kewenangan pengaturan, yang harus digunakan dengan hati-hati dan bijaksana. Dalam industri yang diatur dengan baik, monopoli memiliki sedikit ruang untuk penyalahgunaan kekuatan pasar. Dengan demikian, serangkaian insentif yang efektif harus tersedia bagi penyedia layanan monopoli swasta. Privatisasi berfungsi paling baik. (Masalah et al., 2024)

Kebijakan privatisasi harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik untuk memastikan bahwa bisnis berfungsi secara efektif setelah privatisasi. Transisi kepemilikan perusahaan dari sektor publik ke sektor swasta tidak terlalu penting untuk meningkatkan kinerja dibandingkan dengan perubahan tata kelola perusahaan. Privatisasi dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan ketika terjadi dalam keadaan yang menguntungkan, di mana motif keuntungan pelaku ekonomi diarahkan pada kegiatan produktif daripada mencari keuntungan dan korupsi. Namun, privatisasi bukanlah persyaratan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan yang membangun tatanan pasar yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Afrika Selatan harus dilaksanakan bersamaan dengan privatisasi. (Masalah et al., 2024)

Untuk menciptakan situasi di mana insentif agen sejalan dengan tujuan negara dan kepentingan publik, konflik keagenan harus diselesaikan. Pemerintah harus memilih di antara tiga pilihan: mengomersialkan organisasi sambil mempertahankan kontrol negara, memprivatisasinya secara keseluruhan atau sebagian, atau menjaga agar dana publik tetap mengalir ke anggaran BUMN meskipun terjadi kerugian atau

inefisiensi. Pilihan pertama, mengomersialkan perusahaan di bawah kendali negara, adalah yang paling sulit dilaksanakan karena memerlukan perubahan dalam tata kelola perusahaan yang mungkin bertentangan dengan tujuan politik. Terakhir, kemampuan aparaturnegara untuk menerapkan sistem pemantauan yang efektif menentukan apakah BUMN dapat dikomersialkan. (Masalah et al., 2024)

Dalam dua dekade terakhir, penelitian administrasi publik telah menunjukkan adanya pergeseran sifat pekerjaan sektor publik dari “layanan publik” dan “sistem karir” menjadi sistem yang di dalamnya hak-hak ketenagakerjaan telah dijunjung tinggi. Semakin terpuruk. (Wilson et al., 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang efektif dan efisiensi sektor publik memerlukan keseimbangan antara peningkatan pendapatan (melalui pajak, obligasi, dan pinjaman) dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Privatisasi dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi, namun harus disertai dengan regulasi yang ketat untuk melindungi kepentingan publik. Kebijakan fiskal memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi sektor publik dan mendukung pembangunan ekonomi. Peningkatan pungutan pajak menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan pendapatan negara, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sistem administrasi pajak yang efektif dan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penerbitan obligasi utang, baik dalam negeri maupun luar negeri, menjadi alternatif pendanaan ketika pendapatan pajak tidak mencukupi. Utang dalam negeri cenderung lebih stabil dan minim risiko nilai

tukar, sementara utang luar negeri dapat menyediakan sumber pendanaan yang lebih besar tetapi berisiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan ketergantungan pada kondisi ekonomi global. Kedua instrumen ini perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan. Selain itu, privatisasi dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dengan melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan aset atau layanan publik. Meskipun privatisasi dapat mengurangi beban fiskal pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan, implementasinya harus dilakukan dengan pertimbangan matang untuk menghindari dampak negatif seperti monopoli swasta atau pengabaian kepentingan publik. Secara keseluruhan, kombinasi antara peningkatan pajak, pengelolaan utang yang prudent, dan privatisasi yang terarah dapat memperkuat posisi fiskal pemerintah, asalkan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan efisiensi sektor publik yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bécsi, A., Bognár, G., & Lóga, M. (2021). *Meningkatnya Peran Ekonomi Pasar Obligasi Korporasi* *. 20(September), 5–37.
<http://doi.org/10.33893/FER.20.4.537>
- Edi Irawan. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 01–08.
<https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1898>
- F. Sabado, J. R., R. Tagalog, J. R., L. Sarmiento, E., & B. Gaquit, A. (2024). The Effects of Government Borrowing to Investment Growth of the Country. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 07(02), 1273–1284.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i2-45>
- Fatmawatie, N., Endri, E., & Husein, D. (2024). Macroeconomic factors and government bond yield in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 13(1), 95–105.
[https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.08](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.08)
- Global, P. T., & Teknologi, E. (n.d.). *No Title*.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). *SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Email : royhuda03.7(2), 189–201.*
<https://ojs.stiemkalianda.ac.id/DOI:10.52655/KHG.V7I2.102>
- Khurria, A. (2023). Mengapa Pemerintah Daerah Belum Berhasil Menerbitkan Obligasi Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(5), 594–611.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v4i5.595>
- Masalah, P., Prospek, D. A. N., & Cheteni, H. I. (2024). *PRIVATISASI KEPENTINGAN PUBLIK PERUSAHAAN DI NEGARA-NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG*. 13, 172–180.
<https://doi.org/10.22495/jgrv13i2art17>
- Noch, M. Y., Sutisna, E., & Prasetianingrum, S. (2024). *Dampak Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pertumbuhan Dengan Moderasi Audit Pajak*. 28(03), 556–574.
<http://dx.doi.org/10.24912/ja.v28i3.2400>

- Okunogbea, O., Santorob, F., Bank, P., & Dc, W. (2023). *Meningkatkan Pengumpulan Pajak di Afrika Negara : Peran Informasi Teknologi*. 2022, 57–83. <https://doi.org/10.1093/jae/ejac036>
- Rusiadi, E., & Sari, W. I. (2020). *Stabilitas Ekonomi Makro*. 2(7), 90.
- Sathanantham, S. (2022). *INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN PASAR : PENGUJIAN BATAS ARDL*. April. <https://doi.org/10.22495/clgrv4i1p1>
- Titaaila, V. A., & Fidiana, F. (2022). *Kepatuhan Pajak di Indonesia : Sebuah Meta-Analisis*. 4(2), 61–79. <https://doi.org/10.38157/fer.v4i2.508>
- Wijaya, A., & Ahmar, N. (2022). *Political Connections Impact Aggressive Taxes : a*. 7(1), 29–39. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v7i2>
- Wilson, G., Roscigno, V. J., & Huffman, M. (2015). Racial income inequality and public sector privatization. *Social Problems*, 62(2), 163–185. <https://doi.org/10.1093/socpro/spv001>
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan moneter dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>